

TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia



LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon, 17 Januari 2025

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan



Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum

Mohamad Yusuf Santoso

KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2024 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2024, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2024.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. SDM PPN Kejawanan
- 1.6. Sistematika Penyajian

2. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap
- 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024
- 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

4. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja TA 2024
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2024
- Rencana Aksi Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp22.550.216.000,- yang terealisasi sebesar Rp21.662.423.364,- atau 96,06% dari total pagu Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 115,54%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1).



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai Capaian Tahun 2024 yang mencapai angka 100% atau lebih untuk indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)
2. IK2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
4. IK4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
8. IK8 – Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IK9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

11. IK11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK12 – Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

1.2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Selain itu, Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasikan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diupayakan untuk mewujudkan harapan, menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Udang, Pusat kegiatan perikanan di Pantai Utara bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon cukup mempunyai potensi untuk mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat dari segi potensi perikanan maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumber daya manusia dan lain-lain.



Gambar 2. Master Plan PPN Kejawanan

1.3. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;

9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

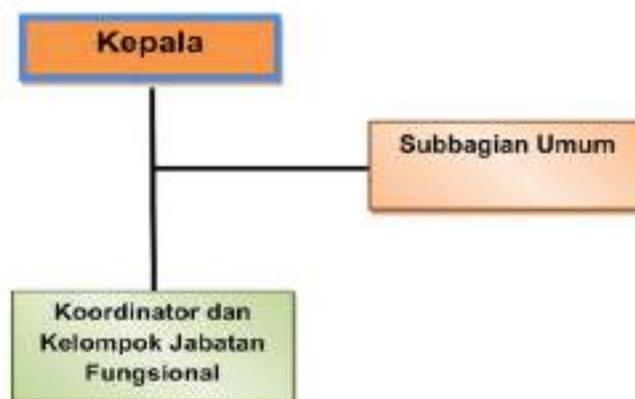
- dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha bertanggungjawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti

sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan

fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pertama), Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Kepegawaian, Pranata Humas (Terampil), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Kejawanan

1.5. SDM PPN KEJAWANAN

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 71 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 44 orang, PPPK sebanyak 19 orang dan Pramubakti sebanyak 8 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset

untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	1	3	-	4
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	5	3	-	8
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	1	1	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	4	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Analis SDMA (Ahli Pertama)	-	-	1	-	1
	- Pranata SDMA (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Pertama)	-	-	1	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	7	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	7	-	-	7
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	8	-	-	-	8
Jumlah		8	23	38	2	71

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	1	-	3	-	-	4
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	2	-	6	-	-	8
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	-	-	2	-	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	2	-	2	-	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	6	-	-	-	-	6
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	1	3	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis SDMA (Ahli Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata SDMA (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	-	1	-	-	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	7	-	-	-	-	7
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	7	-	-	7
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	2	-	6	-	-	8
	Jumlah	-	1	37	4	29	-	-	71

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Dukungan Manajerial	4	4	-
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	8	8	-
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	1	-
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	1	1	-
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	4	4	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	6	4	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	4	4	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	1	1	-
	- Pranata Komputer (Muda)	1	1	-
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Analis SDMA (Ahli Pertama)	1	-	1
	- Pranata SDMA (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Muda)	1	-	1
	- Penata Perizinan (Ahli Pertama)	1	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	7	5	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	7	6	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	-
8.	Pegawai Pramubakti	8	6	2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		71	55	16
Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100,00	77,46	22,54

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kejawanan Tahun 2024 sebagai berikut:



1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2024.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

- Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Visi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

- Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan Misi;
2. **Misi 2.** Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
3. **Misi 4.** Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan;
4. **Misi 8.** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

VISI DAN MISI PPN KEJAWANAN

“Terwujudnya Pusat Usaha Perikanan Yang Berdaya Saing dan Terintegrasi Bertaraf Internasional”

Sebagai “Pusat Usaha Perikanan” artinya bahwa wilayah PPN Kejawanan merupakan pusat bagi kegiatan perikanan dari hulu (perikanan tangkap) sampai hilir (pengolahan dan pemasaran ikan).

“Yang Berdaya Saing” artinya produk perikanan di PPN Kejawanan mempunyai mutu yang dapat bersaing pada pasar domestik, dan internasional.

“Dan Terintegrasi” artinya seluruh aktivitas usaha perikanan saling terkait dan mendukung (mewujudkan KKP mini) termasuk aktivitas pendukung non perikanan untuk mengoptimalkan potensi PPN Kejawanan.

“Bertaraf Internasional” artinya seluruh aktivitas dan usaha di PPN Kejawanan memiliki standar Internasional.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender;
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan;
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan *harvest strategy*, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure;
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Rp. Juta)	4.651,52
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Ton)	5.788
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang Berdaya Saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen (Nilai)	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	87
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	26
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	248
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	12
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	80,00
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	86
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80,00
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80,00
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	88,30

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk Tahun 2024 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan s.d Triwulan IV Tahun 2024

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	58.000.000	57.680.144	99,45
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	45.000.000	44.720.144	99,38
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	13.000.000	12.960.000	99,69
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4.282.674.000	3.452.930.263	80,63
	ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	30.000.000	-	-
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	2.499.674.000	2.408.021.997	96,33
	RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan (Unit)	70.000.000	45.115.000	64,45
	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1.300.000.000	618.577.870	47,58
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM	383.000.000	381.215.396	99,53
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	3.999.000	99,97
	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	4.000.000	3.999.000	99,97
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	43.557.000	43.052.142	98,84
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	43.557.000	43.052.142	98,84
5.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.161.985.000	18.104.761.815	99,68
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	1.255.375.000	1.250.997.000	99,65
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	50.000.000	45.482.400	90,96
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	15.000.000	14.033.408	93,56
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	13.986.341.000	13.972.523.769	99,90
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	2.652.369.000	2.623.070.435	98,89
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	25.000.000	23.379.487	93,52
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	59.000.000	58.381.345	98,95
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	34.000.000	33.468.730	98,44
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	84.900.000	83.425.241	98,26

2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Matriks Capaian Triwulan IV
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KISLOKSIAN PENDUKUNG	RINCI ANGGARAN (Rp.)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TAHUN 2024												Kecapaian				
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV							
								Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%					
1	Nilai PNSP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Penerbitan PNSP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Rp. juta)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Evaluasi PNSP di Pelabuhan Perikanan (238.BG.A.002.095.E)	95.494.000,00	4.651,52	Rp. juta	1.000	1.952,16	195,22%	2.200	3.499,24	159,06%	3.300	6.005,62	182,02%	4.651,52	11.456,04	246,35%	Tercapai				
					730.285.000,00																			
					79.000.000,00																			
					25.000.000,00																			
					137.500.000,00																			
					30.000.000,00																			
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Koordinasi perencanaan pengelolaan data statistik tingkat Ditjen Perikanan Tangkap (2542.03A.903.03)	15.000.000,00	5.786	Ton	800	879,92	109,99%	1.800	1.811,21	100,62%	3.800	3.490,05	91,84%	5.786	6.189,67	106,99%	Tercapai				
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing	Penerbitan permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Pemer)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata laksana dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (238.BG.A.002.094)	83.248.000,00	300	Pemer													300	300	100%	Tercapai	
					4.000.000,00																			
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan tata laksana dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPB) dan Inspeksi Pembungkaman ikan di pelabuhan perikanan (238.BG.A.012.095)	79.118.000,00	84	Nilai	84	86,57	103,19%	84	89,38	106,40%	84	86,73	103,25%	84	97,41	115,98%	Tercapai					

16	Nilai BPA Pelibuhan Perikatan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Layanan Perikatan (1342.EBA.994)	11.988.341.000,00	93,76	Nilai				83	98,07	108,30%			83,36	96,37	102,57%	Tercapai	
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelibuhan Perikatan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Layanan Perikatan dan Penganggaran (1342.EBD.952)	39.000.000,00	73	Nilai									73	90	124,79%	Tercapai	
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelibuhan Perikatan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM (0306.BGA.002.075.P)	8.500.000,00	88,30	Indeks	85,30	79,81	102,84%	85,30	90,64	102,67%	88,30	91,32	106,67%	88,30	96,25	109,18%	Tercapai

Cirebon, 19 Januari 2021
Mengetahui,



WINDO, A.Pi
Kepala PPN Kejawanan

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	4.651,52	11.668,54	120
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	5.788	6.189,67	106,94
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	100	100	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	84	97,42	115,98
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	87	98,32	113,01
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	26	32,10	120
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	30,10	92,36	120
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	248	505	120
6	Pengelolaan Awak	9 Persentase Peningkatan	Persen	12	16,74	120

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
	Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)				
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	80	81,48	101,85
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	80	100	120
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	94	98,54	104,83
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	86	91,48	106,37
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	80	96,29	120
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	80	90	112,50
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	93,76	96,17	102,57
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	71	90	120
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	88,30	96,26	109,01

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

3. 1. 1. Sasaran Kegiatan 1 - Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)

Indikator Penerimaan PNBPN merupakan indikator penerimaan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBPN yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA dan non SDA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Kejawanan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh Tahun 2024. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBPN fungsional dan umum sampai dengan akhir tahun berjalan (kumulatif).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Tahun 2024

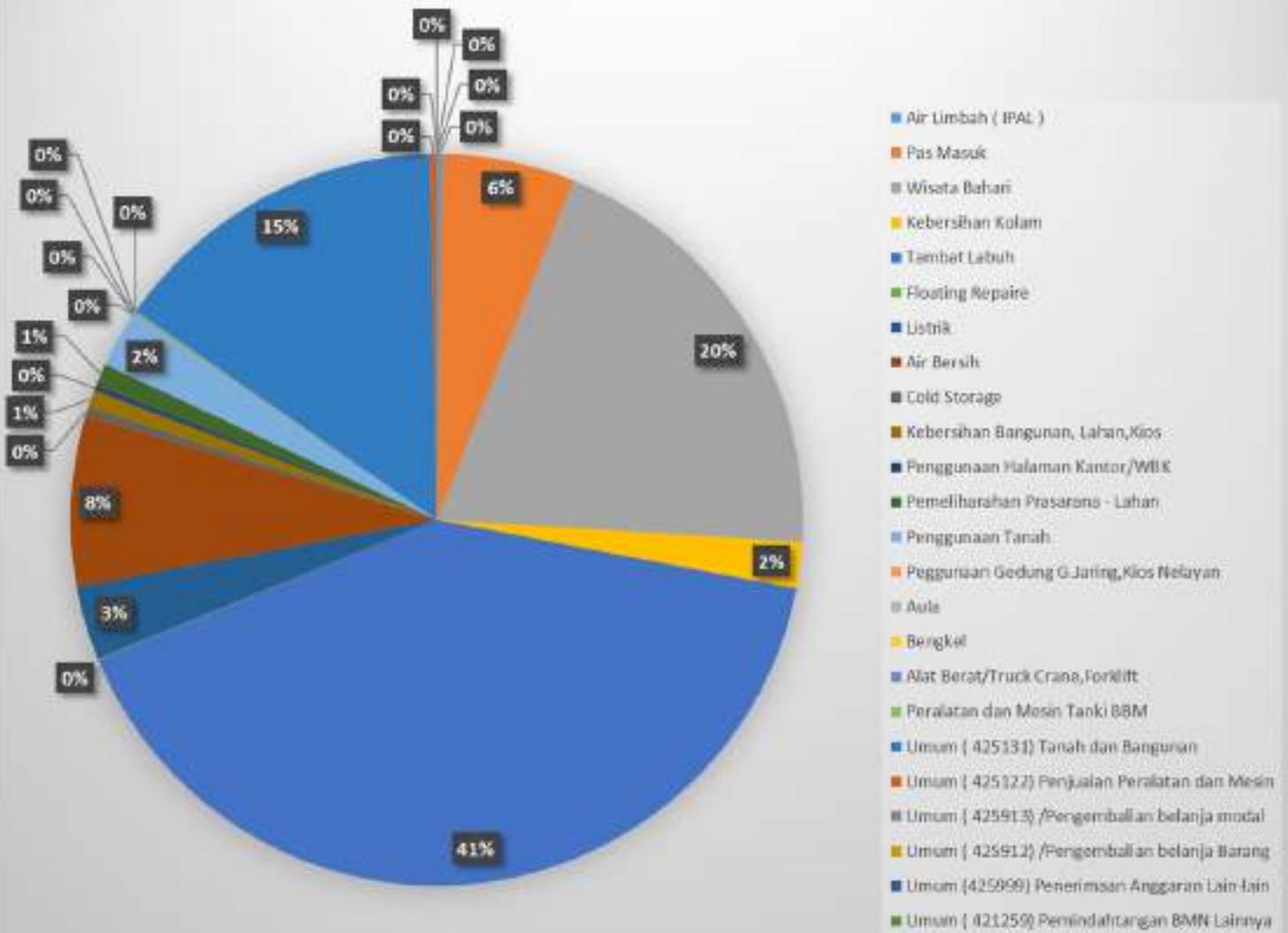
SK 1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
5.739,08	3.015	4.339,07	4.591,14	8.507,99	4.651,52	11.668,54	250,85	3.563	327,49

a. Target dan Realisasi

Sampai dengan Triwulan IV 2024, Nilai PNBPN di PPN Kejawanan tercapai sebesar Rp11.668,54 juta atau persentase capaiannya sebesar 250,85% dari target Tahun 2024.

Capaian tersebut diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Cold Storage, Gedung/Tempat Jaring, Kios Nelayan, Aula, Alat Berat/Truck Crane, Forklift, serta Penjualan Peralatan dan Mesin.

Capaian PNBП Tahun 2024



Nilai PNBП tertinggi pada pelayanan tambat labuh sebesar Rp4.752.506.065,- atau sebesar 41% dari total PNBП Tahun 2024.

Tabel 9. Rincian Nilai PNBП Non SDA di PPN Kejawanan Tahun 2024

NO.	Bulan	Nilai Penerimaan PNBП Non SDA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)
1.	Januari	1.502.788.214
2.	Februari	599.154.187
3.	Maret	830.235.232
4.	April	769.902.942
5.	Mei	1.751.452.405

6.	Juni	446.206.987
7.	Juli	867.357.619
8.	Agustus	655.142.601
9.	September	583.428.877
10.	Oktober	769.451.632
11.	November	986.976.592
12.	Desember	1.906.443.357
Total		11.668.540.645

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,49% - 64,88%. Peningkatan PNBP pada triwulan Tahun 2024 didukung oleh meningkatnya pengunjung Wisata Bahari Kejawanan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Tahun 2024 sebesar 327,49%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)	Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)
4.651,52	11.668,54	250,85	1.013,27	1.353,86	133,61

Capaian indikator kinerja "Penerimaan PNBP Non SDA" bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan, capaian di PPN Kejawanan lebih besar dengan realisasi Rp11.668.540.645

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Gedung/Tempat Jaring, Kios Nelayan, Aula, serta Alat Berat/Truck Crane, Forklift.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Kejawanan adalah perubahan cuaca dan tren penangkapan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pencapaian PNBP khususnya untuk pelayanan tambat labuh, floating repair dan kebersihan kolam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan” Tahun 2024 yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta meningkatkan fasilitas layanan di PPN Kejawanan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan	250,85%	1.377.279.000	1.335.268.144	3.454.964.206	2.119.696.062
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				153,90%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{98,20\%}{20} \times 50 \right)$				434,76%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp1.335.268.144,- atau 96,95% dari total anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 153,90% dan nilai efisiensi sebesar 434,76%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNBP di PPN Kejawanan, didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP ada 13 (tiga belas) pelayanan. Petugas pas masuk harian ada 6 (enam) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Untuk petugas pelayanan jasa air 1 (satu) orang dan listrik 1 (satu) orang, petugas pelayanan penggunaan tanah dan bangunan 1 (satu) orang, petugas pelayanan sewa peralatan dan alat berat 1 (satu) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, petugas pas harian wisata 6 (enam) orang, petugas pelayanan penggunaan halaman wisata bahari 1 (satu) orang, Petugas pengolahan air limbah 1 (satu) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang, Petugas Penggunaan Aula 1 (satu) orang, Petugas Penggunaan Kawasan Pelabuhan 1 (satu) orang petugas penerbitan perjanjian 1 (satu) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan:

- Evaluasi PNBP di Pelabuhan Perikanan
- Layanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi PELARI dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi SiJAKa
- Operasional Wisata Bahari Kejawan
- Expo Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Bazar Produk Perikanan di PPN Kejawan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV terkait dengan pencapaian indikator “Penerimaan PNBP di PPN Kejawan” yaitu koordinasi terkait perizinan, sosialisasi perusahaan di pelabuhan perikanan, monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan, serta peningkatan fasilitas untuk menunjang kegiatan di Wisata Bahari Kejawan.

3. 1. 2. Sasaran Kegiatan 2 - Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan meningkat

IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)

Indikator Kinerja Utama “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” merupakan hasil perhitungan dari jumlah volume produksi yang didaratkan selama triwulan pada tahun berjalan. Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d

Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebanyak 6.189,67 Ton atau sebesar 106,94% dari target Tahun 2024 sebesar 5.788 ton.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat									
IK 2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
8.844,53	4.421,73	6.224,25	4.446,88	5.619,85	5.788	6.189,67	106,94	4.500	137,55

a. Target dan Realisasi

Dari target Tahun Triwulan IV tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar 5.788 ton, jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercapai sebesar 6.189,67 ton atau persentase capaiannya 106,94%. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

NO.	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan (Ton)
1.	Januari	177,62
2.	Februari	377,72
3.	Maret	324,58
4.	April	316,48
5.	Mei	227,83
6.	Juni	430,98
7.	Juli	775,85
8.	Agustus	439,06
9.	September	419,93
10.	Oktober	169,48
11.	November	769,04
12.	Desember	1.761,09
Total		6.189,67

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel volume produksi di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut: Realisasi volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap tahunnya mengalami pergerakan yang cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kapal domisili yang mengalami perubahan fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trend penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap tahunnya, durasi penangkapan ikan yang berubah, perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dll. Faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah trip suatu kapal ketika beroperasi

melakukan penangkapan ikan di *fishing ground*. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, volume produksi juga mengalami perubahan yang sifatnya fluktuatif.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 baru mencapai 137,55%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Volume produksi perikanan tangkap Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
5.788	6.189,67	106,94	13.119	15.823,61	120,62

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan, capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan jauh lebih kecil dengan selisih 9.633,94 ton. Hal ini dapat dimaklumi mengingat PPN Pekalongan memiliki jumlah kapal domisili dan aktivitas pendaratan ikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PPN Kejawanan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan jumlah volume produksi yang besar pula.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan IV Tahun 2024 tercapai dan bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang fluktuatif, trend musim ikan yang semakin tidak terkirakan, trend pelayaran yang semakin panjang, kenaikan harga BBM, dan faktor alam/cuaca serta faktor faktor tidak terduga lainnya. Dalam prosesnya, PPN Kejawanan melakukan beberapa terobosan seperti melaksanakan pencatatan produksi secara digital, efisien dan transparan melalui aplikasi bantu pencatatan. PPN Kejawanan juga memaksimalkan pemanfaatan timbangan digital yang turut serta membantu kinerja petugas di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu hambatan yang ditimbulkan untuk mencapai IKU tersebut lebih kepada hambatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak bisa dihindari seperti alam dan cuaca, trend penangkapan yang semakin lama karena semakin sulit mendapatkan ikan, musim ikan yang semakin tidak terprediksi, dll.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan (palet timbangan, selasar portabel, dll) aplikasi bantu pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, dll.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Volume produksi perikanan tangkap	106,94%	15.000.000	14.033.408	16.040.955	2.007.547
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				13,38%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{34,88\%}{20} \times 50 \right)$				83,46%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp14.033.408,00 atau 93,56% dari total anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 13,38% dan nilai efisiensi sebesar 83,46%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kejawanen, didukung oleh 8 (delapan) orang petugas pendataan produksi ikan dan 5 (lima) orang validator produksi. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanen relatif cepat dan kondusif sehingga tidak ada kegiatan pendaratan ikan yang menghabiskan waktu sampai 24 jam/sampai diberlakukan sistem

shift pegawai. Dengan sumber daya manusia yang ada, kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanana guna mendukung IKU 2 dapat tertangani dengan baik.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Layanan data statistik kelautan dan perikanan di pelabuhan
- Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
- Penambahan validator produksi yang semula hanya 1 orang menjadi 5 orang. Diharapkan dengan jumlah validator produksi yang memadai, alur proses pendaratan ikan tidak terganggu.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu :

- koordinasi dengan instansi terkait perihal validasi data statistik perikanan tangkap.
- Memastikan sarana dan prasarana pendukung seperti timbangan digital, palet, selasar, dll berfungsi secara optimal.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses pendataan volume produksi ikan.

3. 1. 3. Sasaran Kegiatan 3 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanana yang Berdaya Saing

IKU 3 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanana (Persen)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan perusahaan.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 3									
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing									
IK 3									
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada Triwulan IV Tahun 2024 indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 telah terealisasi 100%.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2019 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan untuk perbandingan Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2024 telah sama sama mencapai realisasi 100%.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan sama-sama telah mencapai realisasi 100%

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan realisasi indeks kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, tidak lepas dari komitmen dan kerja keras PPN Kejawanan, khususnya Petugas Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Peran serta dari pengguna jasa yang kooperatif dalam menyampaikan kelengkapan berkas permohonan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kepatuhan usahan dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan	100%	87.248.000	85.925.730	87.248.000	1.322.270
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				1,52%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,28\%}{20} \times 50 \right)$				53,79%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp85.925.730 atau 98,48% dari total anggaran Tahun 2024 dengan nilai efisiensi sebesar 53,79%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, didukung oleh 1 (satu) orang petugas Petugas Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Mengacu pada analisis keberhasilan atau kegagalan, beberapa program / kegiatan dapat menjadi solusi yang dapat berdampak peningkatan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Permohonan yang dianalisis dan atau evaluasi yaitu Kepatuhan usaha dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan.

IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing									
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
76,75	87,41	88	87,47	90,12	84	97,42	115,98	84	115,98

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kinerja pelabuhan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 97,42 atau 115,98% dari target Tahun 2024 yang sebesar 84.

Tabel 20. Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

NO.	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)
1.	Oktober	94,75
2.	November	98,75
3.	Desember	98,75
Triwulan IV Tahun 2024		97,42

Tabel 21. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Oktober Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN					
PPN. Kejawanan					
			October		
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	13,00	4,00	Antara 10 - 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	112,22	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	917,00	2,00	Antara 750 - 1500 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	137,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	5,13	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	17,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	111,76	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	17,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	19,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735,30	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.756,55	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (60)	1,00	---
Jumlah				94,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Tabel 22. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan November Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN					
PPN. Kejawan					
			November		
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	21,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	102,01	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	99,96	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	2.889,00	4,00	Diatas 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	406,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	25,08	3,75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	61,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	106,55	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	20,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	14,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735,30	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.904,85	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (63)	2,00	---
Jumlah				98,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Tabel 23. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Desember Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN					
PPN. Kejawanan					
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Desember		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	27,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	99,57	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100,00	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	5.465,00	4,00	Diatas 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	530,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	39,12	5,00	Lebih dari 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	107,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	100,00	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 99%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	17,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	13,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan KS	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	17,00	4,00	Diatas 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735,30	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.967,52	3,00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	3 (66)	2,00	---
Jumlah				98,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi			SANGAT BAIK		

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami periode yang fluktuatif. sempat mengalami tren positif di tahun 2021, namun kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya pada periode yang sama meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan. Realisasi terhadap capaian indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2024. Kondisi demikian dapat diakibatkan oleh banyak

faktor mengingat evaluasi kinerja dipengaruhi oleh 27 kriteria penilaian, seperti aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal yang setiap tahun mengalami pasang surut, volume produksi harian, dll.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Perbandingan dengan tahun menengah dalam Renstra (2024) adalah 115,98%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
84	97,42	115,98	84	98,25	116,96

Capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan” di PPN Kejawanan tercatat sebesar 97,42 dari target sebesar 84 atau 115,98 %. jika dibandingkan, capaian tersebut lebih rendah dari PPN Pekalongan yakni sebesar 98,25 atau 116,96 dari besaran target yang pada periode yang sama. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah frekuensi kunjungan kapal serta aktivitas pendaratan ikan mengingat di PPN Pekalongan memiliki jumlah kapal domisili yang lebih besar dibandingkan dengan PPN Kejawanan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pada Tahun 2024, indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian evaluasi kinerja sangat tergantung dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan serta keaktifan operator PIPP dalam memasukkan data operasional, baik secara harian maupun bulanan melalui aplikasi PIPP. Keberhasilan atau kegagalan penilaian evaluasi kinerja terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kriteria yang merupakan kegiatan operasional Pelabuhan di PPN Kejawanan, yaitu :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-Logbook
3. Aplikasi SPB Online
4. SHTI

5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (Docking, Bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLKK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (Kapal dan Industri Pengolahan)
22. Penyaluran Es (kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan Tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Tercapainya target juga didukung oleh adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok yang melakukan tugasnya, terpeliharanya manfaat fasilitas fungsional dan pokok Pelabuhan perikanan, tersedianya kualifikasi SDM pegawai yang sesuai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pada Pelabuhan perikanan, dan semakin tumbuh dan berkembangnya stakeholder dalam tata niaga perikanan, serta keaktifan operator PIPP.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti volume produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti faktor cuaca/alam serta trend dan musim penangkapan ikan.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen dan kesadaran masing-masing petugas dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia agar proses pemenuhan kriteria tidak hanya bergantung pada satu/dua individu, sehingga proses pemenuhan kriteria pada evaluasi kinerja bisa efektif dan efisien.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 25. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Operasional Pelabuhan	115,98%	359.519.000	294.868.824	416.956.440	122.087.616
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				33,96%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,59\%}{20} \times 50 \right)$				134,90%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar Rp359.519.000,- atau 82,02% dari total anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 33,96% dan nilai efisiensi sebesar 134,90%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Operasional PPN Kejawanan adalah petugas/penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing kelompok serta operator PIPP yang merangkap sebagai pengelola data dan jabatan fungsional AP3T dan P3T.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Operasional Pelabuhan yaitu :

- Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan;
- Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Operasional Pelabuhan” yaitu sosialisasi serta pembinaan ke pelabuhan binaan meliputi pembinaan kesyahbandaran, pembinaan serta koordinasi terkait pengelolaan dan operasional PIPP, serta melakukan penambahan pengguna PIPP agar proses input serta pemenuhan indikator evaluasi kinerja bisa lebih maksimal.

IKU 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Pelabuhan Perikanan merupakan sarana yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang operasional kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan pelayanan bidang Kesyahbandaran, yang spesifik melayani kapal - kapal perikanan yang beroperasi di pelabuhan perikanan.

PPN Kejawanan, sebagai salah satu pelabuhan perikanan kelas Nusantara, turut melaksanakan tugas dan fungsi Kesyahbandaran sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Pada peraturan tersebut disebutkan setidaknya terdapat 18 tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Namun, pada perhitungan indikator kinerja ini, hanya 3 pelayanan Kesyahbandaran yang dijadikan indikator, yang dianggap sebagai pelayanan yang utama dan paling sering dilaksanakan, antara lain Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pelayanan Penerbitan STBLKK, dan Pelayanan Penerbitan SHTI (Lembar Awal).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing								
IK 5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	85	87	98,32	113,01	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data pada matriks di atas, diketahui bahwa sampai dengan triwulan IV, PPN Kejawanan mencatatkan realisasi pelayanan kesyahbandaran sebesar 98,32%, sementara target pada 2024 adalah sebesar 87%. Artinya, capaian PPN Kejawanan melampaui target yaitu sebesar 113,01%

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2019 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja tersebut. Sementara di Tahun 2023, target untuk IKU ini lebih rendah daripada tahun 2024 yaitu sebesar 85%. Namun demikian, PPN Kejawanan tetap mampu mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
87	98,32	113,01	55	68,87	125,22

PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan merupakan UPT Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di wilayah pantai utara jawa dan merupakan pelabuhan perikanan dengan

kelas yang sama yaitu kelas Nusantara. Dapat dikatakan, keragaan operasional dan pelayanan kesyahbandaran di dua pelabuhan perikanan ini memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, sehingga sangat mungkin untuk dilakukan perbandingan terkait dengan pelayanan kesyahbandaran.

Pada matriks di atas, dapat kita lihat perbedaan yang cukup signifikan, baik dari sisi target maupun realisasi. Meskipun PPN Pekalongan memiliki tingkat realisasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 125,22% dibandingkan PPN Kejawanan yang sebesar 113,01%, namun yang patut menjadi perhatian ada komponen target dan realisasinya. PPN Kejawanan menetapkan target yang cukup besar yaitu 87% dibandingkan PPN Pekalongan yang hanya sebesar 55%. Sementara dari sisi realisasi, PPN Kejawanan berhasil mencatatkan angka 98,32%, jauh lebih tinggi realisasi PPN Pekalongan yang hanya sebesar 68,87%. Bahkan angka ini tidak lebih tinggi dari target yang ditetapkan PPN Kejawanan. Hal ini menandakan PPN Kejawanan berhasil mengimplementasikan dengan baik kebijakan terkait pelayanan kesyahbandaran.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan dalam mencapai target terkait tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Kejawanan, merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi yang terkelola dengan baik, dari level pimpinan sampai dengan petugas pelaksana pelayanan. terdapat banyak faktor yang mendukung keberhasilan ini, namun demikian juga terdapat kendala/ hambatan yang mempengaruhinya. Faktor - faktor pendukung keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesyahbandaran di PPN Kejawanan, antara lain :

Faktor Pendukung:

1. Sosialisasi yang intensif dan komprehensif dari petugas kesyahbandaran kepada stakeholder
2. Pemahaman stakeholder terhadap aplikasi ePIT sudah cukup baik
3. Sarana dan prasarana pelayanan kesyahbandaran sudah cukup memadai

Faktor Penghambat:

Terkadang terjadi kendala pada aplikasi TemanSPB dan e-PIT untuk pelayanan kesyahbandaran, namun dapat diantisipasi dan diselesaikan oleh petugas

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelayanan Kesyahbandaran	113,01%	166.727.000	164.731.583	188.420.674	23.689.091
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				14,21%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{16,55\%}{20} \times 50 \right)$				85,52%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar Rp164.731.583,- atau 98,80% dari alokasi anggaran Tahun 2024.

2. Sumber Daya Manusia

Realisasi capaian indikator ini ditunjang oleh sumber daya manusia Kesyahbandaran yang kompeten dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang tersedia di PPN Kejawanan guna menunjang capaian indikator kinerja ini antara lain; 4 (empat) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, dan 7 (tujuh) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
2. Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
3. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi

3. 1. 4. Sasaran Kegiatan 4 - Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal

IKU 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 4 Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal									
IK 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	32,05	26	32,10	123,46	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut telah mencapai realisasi 23,10% atau sebesar 123,46% dari target 2024

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Tahun 2019 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara perbandingan dengan Tahun 2023, untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,1% dari Tahun 2023.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
26	32,10	123,46	80	100	125

Capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan PPN Pekalongan berbeda tergantung target setiap pelabuhan. Untuk Tahun 2024 persentase yang didapat oleh PPN Kejawanan adalah 123,46% sedangkan untuk PPN Pekalongan adalah sebesar 125%

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan”. Peningkatan fasilitas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana Pelabuhan perikanan.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2024 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Langkah yang akan dilakukan antara lain koordinasi terkait perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/ pengembangan	123,46%	1.713.000.000	999.793.266	2.114.896.154	1.115.102.888

fasilitasnya					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CROI) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				65,10%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{29,20\%}{20} \times 50 \right)$				212,74%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanana” sebesar Rp999.793.266,- atau 58,37% dari alokasi anggaran Tahun 2024.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah KPA, PPK, Pokja ULP dan Tim Teknis PTP yang semuanya dengan jabatan fungsional, sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah sangat efisien.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah PPN Kejawanana telah memiliki dokumen pendukung rencana pengembangan Kawasan berupa: Masterplan, AMDAL, AMDAL LALIN, KKRL, KKKPRL dan Dukungan pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon) untuk pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan.

IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanana (Nilai)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang dioperasikan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanana diukur berdasarkan skor pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan

di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal								
IK 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	87,87	30,10	92,36	306,84	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 92,36 atau 306,84% dari target Triwulan IV Tahun 2024.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 105,11% dari target Tahun 2023 sebesar 87,87%.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra karena IKU tersebut baru muncul pada Tahun 2023.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
30,10	92,36	306,84	30,10	90,29	299,97

Capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan, nilai PPN Kejawanan berada diatas PPN Pekalongan yaitu sebesar 92,36 sedangkan PPN Pekalongan memperoleh nilai sebesar 90,29.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian iku ini dilaksanakan melalui mekanisme penginputan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola lingkungan ke dalam aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan di cantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Nilai pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan didukung dengan telah terlaksananya program pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan sehingga memudahkan dalam penginputan dikarenakan sebagian besar program pada aplikasi telah dilaksanakan di PPN Kejawanan. Pada Triwulan IV pengisian dilaksanakan pada Aplikasi SELARASKAN Versi 2.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	306,84%	207.278.000	200.224.797	636.019.803	435.795.006
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				210,25%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{193,51\%}{20} \times 50 \right)$				575,62%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sebesar

Rp200.224.797,- atau 96,60% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 210,25% dan nilai efisiensi sebesar 575,62%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah tim yang terdiri dari Kepala Pelabuhan sebagai penanggung jawab, Ketua sekretaris dan 5 (lima) orang anggota sesuai dengan surat penugasan dari Kepala PPN Kejawanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan
2. Pelaksanaan tata kelola lingkungan / RKL-RPL di pelabuhan perikanan
3. Audit Internal Kaji Ulang dan Surveillance Integrasi ISO 14001:2015 dan 9001:2015

3. 1. 5. Sasaran Kegiatan 5 - Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Salah satu tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, utamanya yang terkait tupoksi kesyahbandaran, PPN Kejawanan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, terutama pada aspek kelaikan kapal perikanan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, penerbitan dokumen kapal perikanan, dalam hal ini Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dilaksanakan oleh 11 (sebelas) orang pegawai yang telah dikukuhkan menjadi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri KP No. 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Tahun 2024

SK 5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	701	188	248	505	203,63	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa produktivitas penerbitan dokumen kapal tinggi, khususnya penerbitan dokumen SKKP di PPN Kejawanan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 505 atau 203,63% dari target triwulan IV Tahun 2024 yaitu 248 dokumen SKKP. Hal ini, tak lepas dari komitmen PPN Kejawanan dalam mengakomodasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha perikanan tangkap. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, yakni permohonan pemeriksaan kelaikan dari kapal - kapal perikanan yang berdomisili di wilayah Karawang - Jawa Barat sampai dengan wilayah Tegal - Jawa Tengah menjadikan PPN Kejawanan sebagai sentra pelayanan penerbitan SKKP di wilayah pantura Pulau Jawa Barat. Apabila dilakukan *breakdown* terhadap data akumulatif pada tabel di atas, maka penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

NO.	Bulan	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
Tahun 2023		188
1.	Januari	16
2.	Februari	23
3.	Maret	29
Triwulan I Tahun 2024		256
4.	April	26
5.	Mei	48
6.	Juni	34
s.d Triwulan II Tahun 2024		364
7.	Juli	30
8.	Agustus	20
9.	September	22
s.d Triwulan III Tahun 2024		436
10.	Oktober	40
11.	November	15
12.	Desember	14
s.d Triwulan IV Tahun 2024		505

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Data penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 505 dokumen, yang seluruhnya adalah SKKP yang terbit melalui mekanisme pemeriksaan langsung oleh petugas. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan data penerbitan SKKP sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dengan mekanisme pemeriksaan kelaikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu terjadinya peningkatan signifikan jumlah sertifikat yaitu 188 dokumen SKKP yang telah terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, sedangkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 SKKP yang telah diterbitkan yaitu 505 dokumen atau 203,63% dari target tahun 2024. Hal ini dipengaruhi tingkat kesadaran pemilik kapal terhadap kepatuhan kelengkapan dokumen yang semakin meningkat. Banyak kapal - kapal yang dengan ukuran 6 GT di wilayah Pantai Utara Jawa Barat yang mulai mengajukan permohonan penerbitan SKKP. Hal ini merupakan suatu hal yang baru terjadi sejak SKKP beralih ke Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berdasarkan peraturan dari instansi yang menerbitkan Sertifikat Kelaikan sebelumnya menyatakan bahwa kapal yang wajib memiliki Sertifikat Kelaikan adalah kapal - kapal yang memiliki PAS BESAR atau dalam arti memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 7 GT. Sehingga, jumlah penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan juga mengalami peningkatan. Selain itu, pada tahun 2023 masih terdapat penerbitan SKKP kapal-kapal izin daerah melalui mekanisme percepatan/pembaruan sementara tahun 2024 ini seluruhnya SKKP yang terbit melalui mekanisme pemeriksaan.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target pada Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan III Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
248	505	203,63	268	416	155,22

Jika dibandingkan jumlah target sertifikat kelaikan kapal perikanan izin daerah yang diterbitkan dengan PPN Pekalongan, jumlah target sertifikat yang diterbitkan di PPN Kejawanan lebih besar dibandingkan

PPN Pekalongan. Dalam hal ini, PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan berhasil melampaui target yang ditetapkan namun dengan jumlah capaian dan persentase PPN Kejawanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah permohonan dan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan izin daerah yang berada di PPN Kejawanan dan juga pelabuhan pelabuhan binaannya. Selain itu, dimungkinkan bahwa banyak kapal izin daerah di PPN Pekalongan yang izinnya bermigrasi ke izin pusat sehingga jumlah kapal berizin daerah lebih sedikit.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian IKU ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berdasarkan permohonan dari Pengguna Jasa / Pemohon. Pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sepenuhnya dilaksanakan di aplikasi SICEFI melalui tautan kapal.kkp.go.id sejak Oktober tahun 2023. Pemohon dapat mengajukan permohonan kapanpun dan dimanapun melalui tautan tersebut. Semua proses dari mulai pengajuan permohonan kelaikan kapal perikanan hingga mengunduh Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dapat dilakukan mandiri oleh Pemohon pada aplikasi SICEFI. Khusus untuk kapal izin daerah, disposisi penugasan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dilakukan oleh Koordinator, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran. Koordinator mendisposisikan Petugas Verifikasi Permohonan untuk memverifikasi permohonan. Setelah permohonan terverifikasi maka Koordinator membuat Surat Tugas dan menugaskan PPKKP untuk melakukan pemeriksaan kelaikan. PPKKP yang telah melakukan pemeriksaan kelaikan mengunggah seluruh hasil dan foto - foto pemeriksaan kelaikan kapal ke dalam aplikasi SICEFI. Hasil pemeriksaan kelaikan tersebut diverifikasi oleh Petugas Verifikasi Pemeriksaan Kelaikan kemudian masuk ke akun Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani. Proses verifikasi serta penandatanganan SKKP dilakukan di PPN Kejawanan oleh PPKKP dan Kepala PPN Kejawanan, sedangkan proses pemeriksaan kelaikan kapal dilakukan di tempat kapal berada. Sebanyak 69 SKKP untuk kapal perikanan izin daerah telah diterbitkan selama periode Triwulan IV 2024.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan	203,63%	45.000.000	44.720.144	91.633.065	46.912.921
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				104,25%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{276,25\%}{20} \times 50 \right)$				310,63%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp44.720.144,00 atau 99,38% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 104,25% dan nilai efisiensi sebesar 310,63%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 9 (sembilan) orang petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal perikanan yang juga merangkap jabatan fungsional sebagai Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien. Namun, di sisi lain, pemanfaatan SDM ini juga menjadi bahan evaluasi tersendiri karena berpotensi pelaksanaan tugas utama menjadi tidak fokus yang mungkin dapat menghambat proses pelayanan penerbitan SKKP.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor Penghambat :

Meskipun capaian telah melampaui target IKU, namun demikian terdapat penurunan dari periode tahun sebelumnya. hal - hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2024, banyak kapal izin daerah yang melakukan migrasi perizinan ke izin pusat, sehingga terhitung sebagai penerbitan SKKP untuk kapal izin pusat yang tentu saja berdampak pada jumlah sertifikat kapal izin daerah yang diterbitkan oleh PPN Kejawanan.
2. Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan pemeriksaan kelaikan PPN Kejawanan sudah tidak tersedia sejak pertengahan bulan Mei 2024. Sehingga, PPKKP yang telah melakukan pemeriksaan kelaikan harus melakukan skema pertanggungjawaban biaya yang timbul ke anggaran pusat, dalam hal ini Direktorat Kapal dan Alat Penangkap Ikan. PPKKP PPN Kejawanan dianjurkan untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga dalam satu kali perjalanan, PPKKP PPN Kejawanan dapat melakukan pemeriksaan kelaikan di 2 (dua) atau lebih pelabuhan yang berbeda bahkan berbeda Kabupaten, dan jumlah kapal yang lebih banyak. Tindakan efisiensi ini berpengaruh terhadap proses pelayanan penerbitan SKKP dimana permohonan yang sudah masuk serta sudah memenuhi persyaratan administratif dan siap untuk dilakukan pemeriksaan, terpaksa harus ditahan sembari menunggu permohonan lain yang memiliki tempat pemeriksaan di pelabuhan yang sama atau saling berdekatan. Tentu saja ini akan semakin memperlambat proses pelayanan penerbitan SKKP..
3. Meskipun aplikasi SICEFI sepenuhnya sudah diterapkan mulai tahun 2023, namun implementasinya masih kurang maksimal dan masih sering mengalami *trouble* sehingga dapat menghambat proses yang ada. Serta kurangnya sosialisasi kepada stakeholder terkadang membuat stakeholder kebingungan terkait tata cara penggunaan aplikasi SICEFI.

Faktor Pendukung :

Terpenuhinya target IKU didukung oleh beberapa hal di bawah ini :

1. Jumlah SDM Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan PPN Kejawanan sebanyak 9 (sembilan) petugas sampai dengan 2024. Jumlah tersebut masih dikategorikan cukup dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan dan Penerbitan SKKP.
2. Kesadaran para stakeholder kapal kapal berukuran terkait kepatuhan dalam hal kelengkapan dokumen terutama sertifikat kelaikan kapal perikanan terus mengalami peningkatan. Termasuk kapal - kapal dengan ukuran <7 GT yang baru mengajukan permohonan penerbitan SKKP.
3. SICEFI sebagai aplikasi yang memungkinkan permohonan SKKP dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sangat memudahkan Pemohon, sehingga jarak yang jauh tidak menjadi penghambat dalam mengajukan permohonan penerbitan SKKP.

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan
2. Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan berdasarkan permohonan melalui aplikasi SICEFI

3. 1. 6. Sasaran Kegiatan 6 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 9 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha sub sektor penangkapan ikan dan usaha sub sektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan.

Khusus untuk elemen personel, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan merupakan hal penting dan krusial dalam operasional kapal perikanan. Komitmen terhadap penegakan HAM Perikanan menjadi *concern* tersendiri bagi PPN Kejawanan. Melalui penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan aspek perlindungan awak kapal perikanan dapat lebih terjamin. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” Tahun 2024

SK 6 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	14,36	12	16,74	139,5	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Berdasarkan matriks di atas, target pada 2024 adalah sebesar 12%. Meski demikian, PPN Kejawanan dapat mencatatkan capaian sebesar 16,74%, lebih tinggi daripada tahun 2023 yang sebesar 14,36%

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Pada 2023, realisasi terhadap IKU ini adalah sebesar 14,36%, sementara pada 2024, PPN Kejawanan dapat meningkatkan capaian menjadi 16,74%.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak terdapat target menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2024.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
12	16,74	139,5	6	16,36	272,67

PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan merupakan UPT Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di wilayah pantai utara Jawa dan merupakan pelabuhan perikanan dengan kelas yang sama yaitu kelas Nusantara. Dapat dikatakan, keragaan operasional dan pelayanan kesyahbandaran di dua pelabuhan perikanan ini memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, sehingga sangat mungkin untuk dilakukan perbandingan terkait dengan peningkatan kompetensi dan perlindungan terhadap awak kapal perikanan yang berkegiatan di pelabuhan perikanan.

Pada matriks di atas, tahun 2024 PPN Kejawanan mencatatkan realisasi sebesar 16,74%, sedikit lebih tinggi dibanding PPN Pekalongan yang sebesar 16,36%. Namun demikian, PPN Kejawanan menetapkan target dua kali lipat lebih besar dibandingkan PPN Pekalongan yaitu sebesar 12%

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan membutuhkan kolaborasi dan keinginan yang kuat antar pemangku kepentingan. Secara regulasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 telah menetapkan syarat bekerja bagi awak kapal perikanan. PPN Kejawanan telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi unsur - unsur regulasi tersebut dengan pula memperhatikan aspek - aspek

sosial kultural masyarakat nelayan. Selain itu, PPN Kejawanan juga melakukan studi banding dengan pelabuhan perikanan di sekitar wilayah PPN Kejawanan serta UPT Pelabuhan Perikanan yang setingkat, untuk melihat persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan PPN Kejawanan dalam mencapai bahkan melampaui target IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di PPN Kejawanan, khususnya Syahbandar di PPN Kejawanan yang berwenang dalam hal keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dalam mendukung perlindungan HAM perikanan, salah satunya melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL.
2. Kesadaran yang mulai tumbuh dari sisi pelaku usaha dan awak kapal perikanan akan pentingnya perlindungan bagi awak kapal selama bekerja di atas kapal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang intensif dari PPN Kejawanan kepada masyarakat pemangku kepentingan.

Namun demikian, terdapat pula beberapa kendala yang menyebabkan persentase capaian masih sangat kecil, antara lain :

1. Lemahnya penegakan peraturan di pelabuhan perikanan, tidak hanya di PPN Kejawanan, namun juga di seluruh pelabuhan perikanan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kultural ekonomi awak kapal perikanan yang menyebabkan keengganan untuk memiliki sertifikat.
2. Kebutuhan SDM awak kapal yang tinggi menyebabkan traffic permintaan awak kapal yang tidak sebanding dengan SDM awak kapal yang telah tersertifikasi. Sementara itu, kapal perikanan tidak bisa menunggu untuk terpenuhinya SDM awak kapal yang tersertifikasi untuk dapat berangkat melaut sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menentukan kebijakan yang bersifat *win win solution*.
3. Pemilik kapal perikanan yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi, namun kemampuan bekerja awak kapal yang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, menyebabkan awak kapal enggan untuk memiliki sertifikat kompetensi.
4. Terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2254/MEN.KP/XII/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia, yang masih memberikan waktu kepada awak kapal perikanan untuk memiliki sertifikat kompetensi maupun profisiensi sampai dengan 31 Desember 2024.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 41. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/ kompetensi nelayan	139,50%	13.000.000	12.960.000	18.135.000	5.175.000
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				39,81%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{45,31\%}{20} \times 50 \right)$				149,52%	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” sebesar Rp12.960.000,- atau 99,69% dari alokasi anggaran Tahun 2024.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menunjang terlaksananya indikator Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan di PPN Kejawan-an antara lain; 4 (empat) orang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan 7 (tujuh) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/ kompetensi nelayan - Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan/nelayan
2. Penerapan Perjanjian Kerja Laut bagi seluruh kapal perikanan yang mengajukan permohonan

penerbitan Persetujuan Berlayar, sebagai salah satu syarat wajib penerbitan Persetujuan Berlayar bagi kapal - kapal perikanan yang beroperasi di PPN Kejawanan.

3. 1. 7. Sasaran Kegiatan 7 - Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

IKU 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b. Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c. Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d. Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e. Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f. Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7										
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 10										
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
n/a	81,34	85,49	85,49	80,94	80,00	81,48	101,85	75,07	108,54	

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 adalah 81,48 atau 101,85% dari target Tahun 2024.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM tersebut baru muncul pada Tahun 2020 dan memiliki trend kenaikan positif hingga Tahun 2022, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka IKM tersebut memiliki realisasi dengan persentase sebesar 108,54%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
80	81,48	101,85	80	81,33	101,66

Dengan target yang sama, realisasi Nilai PM ZI PPN Kejawanan lebih tinggi dengan selisih nilai 0,15 dari PPN Pekalongan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan dokumen WBK ditentukan oleh pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen WBK yang dipenuhi terhadap dokumen pendukung WBK yang dipersyaratkan.

Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat format LKE yang baru, sehingga perlu ada penyesuaian dan penambahan data dukung lebih lanjut, untuk tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melengkapi kekurangan data dukung pada masing-masing sub area dan melaksanakan kegiatan monev bulanan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	101,85%	41.500.000	36.982.400	42.267.750	5.285.350
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				12,74%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{9,54\%}{20} \times 50 \right)$				81,84%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp36.982.400,00 atau 89,11% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 12,74% dan nilai efisiensi sebesar 81,84%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang melaksanakan tugas terlaksananya capaian indikator kinerja ini masuk dalam Tim WBK berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Pelabuhan. Jumlah SDM sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang terdiri dari Kepala Pelabuhan (Penanggungjawab), Ketua, Sekretaris, serta Koordinator dan Anggota Pokja per masing-masing area. Penggunaan SDM sudah efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi. Selain itu,

pengumpulan dokumen ZI WBK dilakukan melalui link *google drive* sehingga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dokumen yang harus dipenuhi.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	100	100	80	100	125	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2024 adalah 100% atau 125% dari target Triwulan IV Tahun 2024, dimana periode Juli - September 2024 tidak terdapat temuan/rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 Pada tahun 2019-2021, tidak terdapat IKM terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Namun, realisasi dari Tahun 2022-2024 mengalami capaian stagnan yaitu 100%.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
80	100	125	80	93,33	116,66

Jika dibandingkan dengan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di PPN Pekalongan, persentase capaian PPN Kejawanan lebih besar yakni 100%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan rekapitulasi temuan hasil pengawasan periode Juli - September 2024 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak terdapat temuan di PPN Kejawanan sehingga IKM persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Kejawanan pada Triwulan IV sebesar 100%.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan" Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 47. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan perjalanan dalam rangka	125%	78.168.000	76.705.526	97.710.000	21.004.474

pelaporan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				26,87%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{39,33\%}{20} \times 50 \right)$				117,18%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp76.705.526,00 atau 98,13% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 26,87% dan nilai efisiensi sebesar 117,18%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” pada Triwulan IV Tahun 2024, didukung oleh tim pengelolaan keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKM tersebut yang merupakan mandatory dari IKM Inspektorat Jenderal adalah kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan.

IKU 12 - Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja DJPT, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Satker Lingkup DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%).

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	98,69	94	98,54	104,83	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 adalah 98,54 atau 104,83% dari target Tahun 2024.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. IKM tersebut baru muncul pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 98,69 namun mengalami penurunan di Tahun 2024 sebesar 0,15.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
94	98,54	104,83	94	97,91	104,16

Capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Kejawanan lebih tinggi 0,63 dari PPN Pekalongan. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai NPSS PPN Kejawanan yang lebih tinggi.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Hambatan yang dihadapi adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	104,83%	34.000.000	33.468.730	35.642.128	2.173.397,66
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				6,39%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{6,55\%}{20} \times 50 \right)$				65,98%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp33.468.730,00 atau 98,44% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 6,39% dan nilai efisiensi sebesar 65,98%.

2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2024, SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan rincian Kepala Subbagian Umum dan perwakilan dari masing-masing tim kerja.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator kinerja “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” yaitu Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

IKU 13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
60,47	67,58	80,47	84,86	90,94	86	91,48	106,37	81	112,94

a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2024 sebesar 91,48 atau 106,37% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM IP ASN muncul pada Tahun 2019 dan memiliki kenaikan setiap tahunnya hingga Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan munculnya kesadaran pegawai ASN untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian Tahun 2024 memiliki persentase sebesar 112,94% dari target.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
86	91,48	106,37	84	85,86	102,21

Jika dibandingkan, capaian IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan lebih tinggi dari PPN Pekalongan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, hambatan yang dihadapi yaitu pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi belum aktif melaporkan hasil kegiatan bimtek/diklat/sosialisasi yang diikuti ke bagian kepegawaian. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah reminder kepada seluruh pegawai terkait info pendaftaran bimtek/diklat/sosialisasi serta pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi MyASN BKN.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Manajemen SDM	106,37%	444.180.000	442.548.548	472.483.563	29.935.015
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				6,74%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{14,18\%}{20} \times 50 \right)$				8,42%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp442.548.548,00 atau 99,63% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 6,74% dan nilai efisiensi sebesar 8,42%.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 71 (tujuh puluh satu) orang ASN. Agar capaian IP ASN maksimal, masing – masing pegawai telah diarahkan mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatan memenuhi kriteria penilaian dimensi kompetensi selain itu diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan pegawai dan monitoring bulanan SKP pegawai untuk menjaga nilai kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2024 yaitu monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, pegawai dihimbau untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Seminar/Workshop secara luring maupun daring.

IKU 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
n/a	n/a	87,10	87,10	89,69	80,00	96,29	120,36	75	128,39	

a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah 96,29 atau 120,36% dari target Tahun 2024.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM tersebut baru muncul pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga Tahun 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2024 memiliki persentase sebesar 128,39%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan III Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
80,00	96,29	120,36	80,00	96,29	120,36

PPN Kejawan mempunyai realisasi dan capaian sama dengan PPN Pekalongan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tidak terdapat kendala yang berarti, namun tetap dilakukan upaya untuk memantau dan jika dimungkinkan percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	120,36%	3.907.744.000	3.874.067.435	4.703.458.372	829.390.937
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				21,22%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				103,06%	

$= 50\% + \left(\frac{16,18\%}{20} \times 50 \right)$	
--	--

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp3.874.067.435,00 atau 99,14% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 21,22% dan nilai efisiensi sebesar 103,06%.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola PBJ.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan dalam RKAKL yang menunjang kegiatan ini diantaranya pekerjaan fisik maupun belanja barang/jasa.

Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

IKU 15 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPN Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN Satker diukur berdasarkan jumlah nilai dari berbagai unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (10%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%);
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) yang diselesaikan (25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (25%);
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Tabel 57. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	85	85	87,50	80	90	112,50	75	120

a. Target dan Realisasi

Realisasi indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 sebesar 90 atau 112,50% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

IKM tersebut baru muncul pada Tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2024 memiliki persentase sebesar 120%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
80,00	90	112,50	80,00	90	112,50

PPN Kejawanan mempunyai target dan realisasi yang sama dengan PPN Pekalongan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Selama Tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi bmn untuk pemanfaatan (sewa) dan penggunaan barang; usulan penghapusan BMN eks dana bergulir Departemen Pertanian Tahun 2003; usulan PSP BMN ke eselon 1; koreksi pencatatan kode barang BMN di aplikasi SAKTI modul aset tetap.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 59. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN	112,50%	6.732.000	6.719.715	7.573.500	853.785
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				12,68%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{13,05\%}{20} \times 50 \right)$				81,71%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp6.719.715,00 atau 99,82% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 12,68% dan nilai efisiensi sebesar 81,71%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola BMN.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu pelaksanaan kegiatan laporan keuangan dan BMN yang merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

IKU 16 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Fokus penilaian dalam PMK tersebut bukan hanya besarnya penyerapan anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tetapi juga pada pencapaian output anggaran melalui :

- a. Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM;
- b. Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D; dan
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, memuat 13 (tiga belas) komponen adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontrak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Konfirmasi Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Hal.3 DIPA;
8. LPJ Bendahara;
9. Renkas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi.

Tabel 60. Capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	95,79	95,67	94,41	95,69	93,76	96,17	102,57	91	105,68

a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 sebesar 96,17 atau 102,57% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Pada Tahun 2019 belum terdapat indikator kinerja Nilai IKPA, sementara dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan. Capaian baru mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2023 memiliki persentase sebesar 105,68%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2024 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
93,76	96,17	102,57	93,76	97,04	103,5

Jika dibandingkan capaian Nilai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan PPN Pekalongan, capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA” PPN Kejawanan lebih rendah.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Pengukuran dan pelaporan indikator kinerja ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi 13 (tiga belas) komponen yang terdapat pada monev PA pada aplikasi OM-SPAN. Keberhasilan

pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor	102,57%	13.986.341.000	13.972.523.769	14.345.844.859	373.321.090
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				2,67%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,76\%}{20} \times 50 \right)$	56,67%
--	--------

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 13.972.523.769,00 atau 99,90% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 2,67% dan nilai efisiensi sebesar 56,67%.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, didukung 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengelola Monev, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Mahir, serta 2 (dua) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

IKU 17 - Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feedback) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi ini dibangun dengan sistem *web-based*, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Tabel 63. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
IK 17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
97,99	n/a	85,84	84,30	84,89	71	90	126,76	90	100

a. Target dan Realisasi

Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 sebesar 90 atau 126,76% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021-2024, realisasi Tahun 2024 lebih tinggi, namun nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Persentase perbandingan dengan target dalam Renstra adalah 100%, yang berarti target pada Renstra sama dengan realisasi Tahun 2024.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
71	90	126,76	71	90	126,76

PPN Kejawanan mempunyai target dan realisasi yang sama dengan PPN Pekalongan.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Faktor penghambat pencapaian NKA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 65. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	126,76%	59.000.000	58.381.345	74.788.732	16.407.387
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				27,81%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{5,26\%}{20} \times 50 \right)$	119,52%
--	---------

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp58.381.345,00 atau 98,95% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 27,81% dan nilai efisiensi sebesar 119,52%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
IK 16	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi 2024			Renstra PPN Kejawanan	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Th. 2024	% Realisasi thd Target Th. 2024	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	90,43	88,30	96,26	109,01	n/a	-

a. Target dan Realisasi

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 96,26 atau 109,01% dari target.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 Pada tahun 2019-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023.

c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra

Tidak dapat membandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan II Tahun 2024 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88,30	96,26	109,01	88,30	90,55	102,55

Jika dibandingkan dengan PPN Pekalongan, realisasi capaian Nilai SKM PPN Kejawanan lebih tinggi dengan selisih persentase sebesar 5,71%.

f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Adanya informasi mengenai fasilitas memancing yang belum diterima seutuhnya oleh pengguna jasa. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi secara rutin terhadap petugas layanan agar sigap saat bertugas dan secara rutin menyampaikan informasi pelayanan ke pengguna jasa, sehingga informasi diterima secara utuh.

g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM	109,01%	8.500.000	8.500.000	9.266.251	766.251
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				9,01%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{4,88\%}{20} \times 50 \right)$				72,54%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp8.500.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran Tahun 2024 dengan efisiensi 9,01% dan nilai efisiensi sebesar 72,54%.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pranata Komputer.

h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni Review SOP Standar Pelayanan Pengukuran SKM merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp22.550.216.000,00 yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 69. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2024

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	58.000.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4.282.674.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	43.557.000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.161.985.000
TOTAL		Rp22.550.216.000,-

Dari pagu anggaran tersebut diatas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp22.550.216.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar Rp21.662.423.364,- atau 96,06% dari jumlah pagu Tahun 2024.

Tabel 70. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2024

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	58.000.000	57.680.144	99,45
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	45.000.000	44.720.144	99,38
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	13.000.000	12.960.000	99,69
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4.282.674.000	3.452.930.263	80,63
	ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	30.000.000	-	-
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	2.499.674.000	2.408.021.997	96,33
	RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan (Unit)	70.000.000	45.115.000	64,45
	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1.300.000.000	618.577.870	47,58
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM	383.000.000	381.215.396	99,53
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	3.999.000	99,97
	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	4.000.000	3.999.000	99,97
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	43.557.000	43.052.142	98,84
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	43.557.000	43.052.142	98,84
5.	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.161.985.000	18.104.761.815	99,68
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	1.255.375.000	1.250.997.000	99,65
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	50.000.000	45.482.400	90,96
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	15.000.000	14.033.408	93,56
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	13.986.341.000	13.972.523.769	99,90
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Unit)	2.652.369.000	2.623.070.435	98,89
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	25.000.000	23.379.487	93,52
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	59.000.000	58.381.345	98,95
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	34.000.000	33.468.730	98,44
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	84.900.000	83.425.241	98,26

BAB IV. PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp22.550.216.000,- yang terealisasi sebesar Rp21.662.423.364,- atau 96,06% dari total pagu Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 115,54%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi KinerjaJaku pada Gambar 4).



Gambar 4. Dashboard pada aplikasi KinerjaJaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai Capaian Tahun 2024 yang mencapai angka 100% atau lebih untuk indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Juta Rupiah)
2. IK2 – Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
4. IK4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
8. IK8 – Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

9. IK9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
11. IK11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK12 – Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

4. 2. Saran

Dengan tercapainya semua target IKU dan IKM pada Tahun 2024 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di triwulan berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Tahun 2024 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Tahun 2024 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Tahun 2024 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kemari.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sarwono**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala PPN Kejawanan


Sarwono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Rp. juta)	4.651,52
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Meningkatkan	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.788
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	87
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	26
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	248
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	12
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	80,00
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	86
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	88,30	

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	58.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	4.282.674.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	43.557.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.161.985.000
Total Anggaran PPN Kejawanan Tahun 2024		22.550.216.000

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala PPN Kejawanan



Sarwoto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON - 45113

TELEPON (0231) 210084

LAMAN www.kkp.go.id, [Surat Elektronik : ppn.kejawanan@kkp.go.id](mailto:SuratElektronik@ppn.kejawanan@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Nomor : B.11/KPA-PPNK/HK.510/II/2024**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program/Proyek Pembangunan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.34/MEN-KP/KU.611/2022 tentang Perubahan Ketiga Puluh Tujuh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-032.03.2.622482/2024 Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN ANGGARAN 2024**
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tim Penyusun Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN



SARWONO, A.Pi
NIP. 19750508 199803 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor: B.11/KPA-PPNK/HK.510/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2024

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Mohamad Yusuf Santoso, A.Md, S.Pi	Ketua
2.	Sari Puspita, S.Psi	Sekretaris
3.	Ana Sholihah Nugraheni, A.Md	Anggota
4.	Novirman Robi Putra, S.St.Pi	Anggota
5.	Zulfan Fahmi Geva Aqviansyah, A.Md	Anggota
6.	Shandra Dewi Adresanty, S.S.T.Pi	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN



SARWONO, A.Pi
NIP. 19750508 199803 1 004

